



Aset DKI R awan Diserobot

Waspada Mafia Tanah

KEPEMILIKAN aset berupa lahan Pemprov DKI Jakarta hingga kini tak jelas. Pasalnya, sistem inventarisasi aset yang dilaksanakan terkesan tak transparan. Hal itu terjadi lantaran banyak oknum pejabat di birokrasi yang bermain-main dengan lahan yang belum jelas kepemilikannya. Tak jarang keberadaan lahan tertentu berakhir dengan sengketa kepemilikan.

Sistem pengelolaan aset dan inventarisasi lahan yang tidak maksimal menyebabkan Pemprov DKI Jakarta banyak kehilangan lahan. Aksi penyerobotan lahan pun marak terjadi di tengah masyarakat. Satu sama lain saling klaim kepemilikan dengan bukti kepemilikan yang samar, bahkan sarat dengan pemalsuan. Banyak pula kasus-kasus sengketa lahan perorangan yang juga menggunakan tangan-tangan pejabat. Akibatnya, kondisi kepemilikan lahan di Jakarta semakin semrawut.

Beberapa contoh kepemilikan lahan DKI yang lepas ke tangan para pengusaha, seperti lahan milik Bank DKI seluas 8.000 meter persegi di kawasan Jalan Thamrin, kini telah dikuasai group perusahaan tertentu. Kemudian lahan bekas kantor walikota Jakarta Barat di Jalan S Parman seluas 6.000 meter persegi yang kini dikuasai Yayasan Saweri Gading.

Selain itu, terdapat lahan ribuan meter persegi di Rawa Bebek, Cempaka Putih yang merupakan tanah milik menteri di era Soekarno yang bernama Ahmad Syafei, kini ham-

pir dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan swasta. "Penyerobotan lahan di Jakarta sudah terjadi sejak lama, dan sampai hari ini masih terus terjadi," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan kepada INDOPOS, kemarin.

Penyebab maraknya kasus penyerobotan lahan, kata Taufik, dikarenakan lemahnya pengawasan pemprov dalam menjaga aset-

asetnya. "Kalau mau dijabarkan akan sangat banyak kasus penyerobotan. Sekarang bolanya ada di pemprov, apakah akan serius merebut lahan-lahan itu atau hanya tinggal diam saja," tandas dia.

Bukti lemahnya pemprov dalam mempertahankan aset, sambung dia, yakni ketika pemprov kembali kalah saat memperjuangkan tanah dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap sertifikat tanah seluas 12 hektar untuk pembangunan Lapangan BMW, beberapa waktu lalu.

Kondisi demikian terjadi lantaran lemahnya sistem administrasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya, Pemprov DKI sering mengalami kekalahan ketika gelar perkara di meja hijau. "Bagaimana mau menang, BPKD DKI sejauh ini kan tidak punya data aset yang menjadi miliknya," terang Taufik.

Selain itu, Taufik mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kepemilikan lahan. Pasalnya saat ini marak terjadi penyerobotan lahan oleh 'mafia tanah' yang bekerjasama dengan aparat birokrat dan penegak hukum. "Kondisi ini banyak terjadi.

Kasih masyarakat kecil, meski punya bukti kepemilikan, namun tiba-tiba lahannya bisa diserobot oleh orang kaya yang dekat dengan pejabat," tegas dia.

Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. Ia mengaku sering mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan aset-aset yang dimiliki. Terakhir kali ketika membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Ahok ke DPRD, Kamis 23 April 2015.

Saat itu, Pantas meminta Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, menjaga seluruh aset-aset Pemprov. Sebab selama ini banyak aset Pemprov yang hilang karena tak dikelola secara serius.

"Gubernur DKI Jakarta harus mempersiapkan ahli hukum yang kuat untuk mempertahankan aset-aset pemda DKI Jakarta agar tidak terjadi kekalahan beruntun di pengadilan ataupun kehilangan aset daerah. Gubernur harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun Jakarta baru yang lebih baik," desak Pantas.

Aksi penyerobotan lahan pribadi juga sering terjadi oleh pihak yang terbilang dengan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Seperti lahan atas nama Ali Bunyamin bin Emung dengan girik Nomor C2153 seluas 3.370 meter di kawasan Jalan Gedong, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kini diserobot oleh seseorang bernama Mery.

Tak tanggung-tanggung, Mery menyerobot lahan yang memiliki ahli waris sebanyak delapan orang itu dengan menggunakan tangan aparat kepolisian. Padahal lahan tersebut dimiliki oleh orang tua para ahli waris sejak tahun 1968. Sedangkan Mery memiliki lahan di sebelahnya, lalu mencaplok lahan para ahli waris tersebut.

Para ahli waris merasa terkejut ketika puluhan aparat kepolisian diterjunkan untuk memagar lahan pada Rabu tanggal 6 Mei 2015.

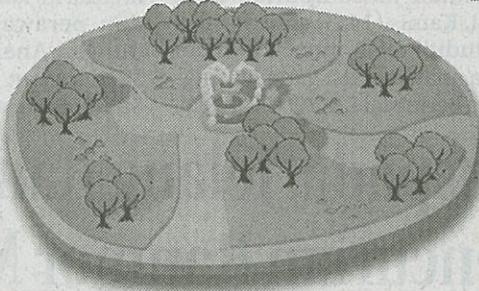
Kasih masyarakat kecil, meski punya bukti kepemilikan, namun tiba-tiba lahannya bisa diserobot oleh orang kaya yang dekat dengan pejabat"
TAUFIK HADIWAN
Anggota DPRD DKI Jakarta



Padahal tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara Mery dengan para ahli waris. Ahli waris sempat berdebat dengan kapolsek yang memaksa memagar dengan alasan perintah dari kapolres Jakarta Selatan.

“Sampai sekarang lahan ditungguin polisi sejak Kapolsek selalu bilang agar ahli waris bertanya langsung dengan kapolres. Kami sudah dialog tapi malah ada ancaman penangkapan. Mery punya sertifikat yang mengatasnamakan lahan sebelahnya. Ini jelas penyero botan,” ungkap Jamal selaku pemegang kuasa atas lahan tersebut.

Karena tindak penyero botan itu, ahli waris bernama Chalid Badjeri melaporkannya ke Polda Metro Jaya terkait pasal memasuki perkarangan tanpa izin dan pemalsuan (167 KUHP dan 263 KUHP). “Sebab lahan tidak sengketa. Belum ada putusan pengadilan, tapi tiba-tiba diklaim sebagai milik Bu Mery. Padahal belum pernah jual,” ungkap dia. **(wok/ibl)**



PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN LAHAN

- Lokasi lahan di Jalan Bawang, Jakarta Selatan
 - Yakni lahan kosong milik Pemprov DKI yang mau dialih fungsi dan mau diperjualbelikan (tukar guling). Bahkan plang milik DKI dicoret oleh oknum
- Lokasi Gedung GMK di Jalan bawang dan Jalan Saakinah (*Jl Raya TB Simatupang*)
 - Berada di jalur hijau. Gedung bersebelahan dengan Sutet.
 - Pernah dilarang, namun beroperasi kembali
- Lokasi lahan di Jalan Baung, Kel Kebagusan, Kec Pasar Minggu
 - Lahan kosong sebagai jalur hijau namun dibangun kompleks ruko. Pernah disegel, tapi beroperasi lagi
- Lokasi lahan dibangun Apartemen LA City
 - Kontur tanah tak memadai, di Jalan Lenteng Agung Raya, depan Stasiun Lenteng.
 - Terindikasi salah peruntukan Pemberian izin oleh birokrat dipertanyakan

GIMBALINDOPOS